



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DODDY RAHADI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **457690**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **48.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 44 m2/44 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/60 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 1.100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 4700 m2/670 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 17.450.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 6800 m2/3000 m2 di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 25.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **250.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---****D. SURAT BERHARGA** Rp. **33.750.000****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **2.444.320.933**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 51.478.070.933

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 51.478.070.933

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.